

Pertunjukan Jalanan dan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur

Kahlila Denali Lawe

Departemen Ilmu Budaya, Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro
kahlila.lawe@gmail.com

Tari Purwanti

Departemen Ilmu Budaya, Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro
taripurwanti@lecturer.undip.ac.id

Abstract

Poverty persists as an enduring global dilemma, and Indonesia epitomizes this challenge with a significant number of its populace ensnared in its grasp. The intricate relationship between poverty and busking further underscores the pervasive nature of socio-economic struggles. The term 'buskers' refers to those who choose the streets as their stage, a phenomenon observable across the archipelago, spanning from Sabang to Merauke. However, the evolution of this community has taken an interesting trajectory over time. Beyond conventional musical renditions and sidewalk performances, contemporary Indonesian buskers have diversified their expressions, branching into novel forms of artistic representation. Yet, this transformation does not necessarily mirror prosperity. In stark contrast to their international counterparts, the socio-economic predicament faced by Indonesian buskers remains unresolved. This article delves into an exploration of pertinent literature on busking, aiming to establish correlations between this artistic pursuit and the achievement levels of Sustainable Development Goals (SDGs) 1 and 8. Specifically focusing on the DKI Jakarta Province, the inquiry seeks to unravel the intricate dynamics at play and discern potential pathways towards addressing the socio-economic challenges intertwined with the practice of busking in Indonesia.

Keywords: Poverty, Buskers, Indonesia, Sustainable Development Goals (SDGs)

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi dilema global yang berkepanjangan, dan Indonesia merupakan contoh dari tantangan ini dengan banyaknya penduduk yang terperangkap dalam kemiskinan. Hubungan rumit antara kemiskinan dan pengamen semakin menegaskan sifat perjuangan sosio-ekonomi yang sangat luas. Istilah 'pengamen' mengacu pada mereka yang memilih jalanan sebagai panggungnya, sebuah fenomena yang dapat diamati di seluruh nusantara, mulai dari Sabang hingga Merauke. Namun, evolusi komunitas ini telah mengambil arah yang menarik seiring berjalannya waktu. Di luar penampilan musik konvensional dan pertunjukan di trotoar, pengamen kontemporer Indonesia telah mendiversifikasi ekspresi mereka, bercabang ke dalam bentuk representasi artistik yang baru. Namun, transformasi ini tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan. Berbeda sekali dengan rekan-rekan mereka di internasional, kesulitan sosio-ekonomi yang dihadapi oleh para pengamen di Indonesia masih belum

terselesaikan. Artikel ini menyelidiki eksplorasi literatur terkait tentang mengamen, yang bertujuan untuk membangun korelasi antara upaya artistik ini dan tingkat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 1 dan 8. Khususnya yang berfokus pada Provinsi DKI Jakarta, penyelidikan ini berupaya untuk mengungkap seluk-beluknya. dinamika yang terjadi dan melihat potensi jalur untuk mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang terkait dengan praktik mengamen di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengamen, Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

1. Pendahuluan

Pengamen adalah sebutan untuk mereka yang melakukan penampilan musik di jalanan maupun di ruang publik lainnya untuk berbagai tujuan, baik untuk sumber pendapatan ekonomi maupun kesenangan pribadi untuk menghibur orang lain (walau alasan kedua sudah sangat jarang ditemukan). Dalam dunia internasional, kebijakan dan pandangan terhadap pengamen (*atau street buskers*) cukup beragam dan pendekatan terhadap mereka cukup menarik untuk dikaji. Satu studi oleh Doumpa & Broad (2014) mengenai pengamen dan seniman jalanan di 50 negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa mengamen merupakan wujud kesenian urban yang mampu berperan sebagai alat *placemaking*. Terutama di negara-negara Barat, pengamen (atau seniman jalanan) banyak dipandang sebagai ikon kebudayaan urban dan pemerintah setempat mampu mengakomodir kebutuhan mereka tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lain sehingga merevitalisasi ruang sosial. Sejauh ini, penulis belum menemukan studi yang menyatakan bahwa para seniman jalanan di luar negeri datang dari golongan miskin. Bahkan, *Economic Research Institute* (2019) dalam Stabler & Mierisch (2021) menyatakan bahwa pemasukan mereka antara \$1000 sampai lebih dari \$100,000 setiap tahunnya (Stäbler & Mierisch, 2022).

Di Indonesia, pengamen lekat sekali dengan kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pengamen sebagai salah satu kategori masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, disingkat sebagai PMKS. Hal ini dikarenakan mengamen dipandang sebagai bentuk lain dari mengemis, dan tidak sedikit dari mereka yang turun ke jalanan untuk mengamen adalah remaja marginal dan anak di bawah umur yang terkena eksploitasi (anak-anak jalanan). Sejauh ini, penulis belum menemukan studi yang mengaitkan pengamen dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* maka artikel ini

merupakan upaya untuk mendeskripsikan masyarakat pengamen di DKI Jakarta dengan tingkat keberhasilan SDGs tujuan ke-1 dan ke-8 provinsi DKI Jakarta. Penulis memilih tujuan ke-1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) secara spesifik karena masyarakat pengamen didominasi oleh masyarakat miskin (golongan bawah) yang mana mereka menjadikan mengamen sebagai sumber pemasukan ekonomi mereka. Mengamen adalah pekerjaan mereka. Berangkat dari hal tersebut, maka dibutuhkan pendekatan akurat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Kota negara saat ini.

SDGs atau dalam bahasa Indonesia-nya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan program pembangunan berkelanjutan global yang berpaku pada 4 pilar: manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs mencakup 17 tujuan (<https://sdgs.jakarta.go.id/sekilas-sdgs>):

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penangan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuan 1-5 merupakan cakupan dari pilar pembangunan sosial Tujuan 7- 10 dan 17 merupakan cakupan dari pilar pembangunan ekonomi, Tujuan 6 dan 11-15 merupakan

cakupan dari pilar pembangunan lingkungan, dan Tujuan 16 merupakan cakupan dari pilar pembangunan hukum dan tata kelola. SDGs mengusung target hingga tahun 2030 yang berjalan dari tahun 2015 silam, melanjutkan dari MDGs (*Millenium Development Goals*).

Artikel ini sejatinya merupakan kajian literatur mengenai pengamen dan kemiskinan serta bagaimana tingkat keberhasilan dari pencapaian SDGs Tujuan 1 dan Tujuan 8 dalam mengatasi kedua permasalahan tersebut. Dari berbagai penelitian serta studi tentang pengamen yang telah penulis saring, baik di Indonesia maupun internasional, belum ada yang mengkaji permasalahan ini dari SDGs. Maka, artikel ini berupaya untuk mengisi *gap* penelitian mengenai pengamen sebagai problematika pembangunan sosioekonomi di Indonesia yang harus diselesaikan jikalau negara ini mencapai capaian indikator yang tinggi pada tahun 2030 mendatang. Adapun limitasi dari artikel ini adalah tidak ada data primer mengenai kondisi riil dari masyarakat pengamen di DKI Jakarta.

2. Metode

Wacana kemiskinan merupakan topik yang gencar di kalangan ilmuwan dan menarik perhatian para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Dalam artikel ini, fokus strategis telah diterapkan, untuk mempersempit ruang lingkup hanya pada disiplin ilmu antropologi. Ketepatan ini bertujuan untuk menyaring wawasan dari sejumlah besar penelitian dan menyajikan kajian kemiskinan yang ditargetkan dalam kerangka akademis tertentu. Dalam cakupan studi kemiskinan yang luas, penulis melakukan eksplorasi online yang terfokus, dan mengidentifikasi tujuh artikel yang secara khusus membahas fenomena pengamen di Indonesia. Dari pilihan yang dikurasi ini, lima penelitian dikutip langsung dalam artikel ini, yang memberikan kontribusi perspektif yang berbeda terhadap wacana tersebut. Sebaliknya, penyelidikan terhadap kemiskinan secara strategis mempertajam disiplin ilmu antropologi, menyaring wawasan yang relevan dari banyaknya penelitian yang tersedia mengenai subjek yang beragam ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertunjukkan Jalanan dan Pengamen (pengamen/street buskers)

Sejauh ini, belum ada definisi baku dari pengamen melainkan sebagai orang-orang yang melakukan penampilan di jalanan untuk tujuan apapun. Faktor pendorong utama golongan masyarakat miskin untuk mengamen adalah ekonomi. Pengamen (dan pengemis) jalanan oleh pemerintah dikategorikan sebagai masyarakat yang rentan yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial atau disingkat sebagai PMKS: terdiri dari orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, tuna susila, pengamen remaja/dewasa, manusia silver, badut, ondel-ondel, pengamen punk, pemulung, parkir liar, dan lainnya. Pada tahun 2021, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah menjangkau sebanyak 5.513 PMKS, 937 orang lebih banyak dibandingkan tahun 2020 (4.567 orang) (Dinas Sosial DKI Jakarta, 2021). Mengamen dipandang sebagai alternatif dalam mencari penghidupan bagi masyarakat miskin, maka praktiknya lekat dengan tindakan kriminalitas seperti premanisme dan eksploitasi anak (Yuniarti, 2013; Hilmi, 2015; Nugroho dkk., 2017).

Dalam penelitiannya mengenai pengamen jalanan dan pembentukan subkultur (*subculture*) *punk* di Kota Medan, Suharyanto (2021) mengemukakan bahwa kelompok pengamen dapat dibedakan berdasarkan motivasi mereka untuk turun ke jalanan. Pengamen yang turun ke jalanan karena dorongan ekonomi menjalankan tugasnya sebagai “penghibur” jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ho & Au, 2021; Suharyanto, 2021). Dalam kata lain, mereka menjadikan mengamen sebagai sumber pendapatan mereka. Bouissac (1992) dalam Ho & Tung Au (2021) menjelaskan bahwa mengamen atau *busking* adalah wujud modern dari cara kelangsungan ekonomi kuno dan didukung oleh hasil penelitian historis Reed (2009) dalam bukunya yang berjudul “*Rogue Performances: Staging the Underclasses in Early American Theatre Culture*” bahwa ekonomi dan ras dari masyarakat golongan bawah (meminjam konsep ‘*lumpenproletariat*’ yang dikemukakan oleh Marx) direpresentasikan dan berkontribusi kepada pertunjukan teater Amerika dan Inggris pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 (Mielke, 2010).

Kelompok pengamen lainnya yang disebutkan oleh Suharyanto (2021) adalah mereka yang menjadikan mengamen sebagai gaya hidup, adanya panggilan untuk turun ke jalanan. Mereka menjadikan jalanan sebagai panggung mereka; untuk menafkahi diri,

untuk mengekspresikan pemberontakan mereka terhadap budaya dominan masyarakat (*high culture*) sehingga muncullah sebuah subkultur *punk* di kalangan pengamen.

Pengamen memang sejatinya lekat dengan jalanan. Jalanan merupakan sebuah ruang publik (*public space*), sebuah ruang spasial di mana dapat terjadi berbagai aktivitas di dalamnya dan sebenarnya sebuah konsep yang cukup luas (Ho & Au, 2021). Menurut Ho & Tung Au (2021, hlm. 2), terdapat 12 jenis ruang publik di Hong Kong: 1) fasilitas transportasi umum; 2) jalanan; 3) alun-alun; 4) ruang rekreasi; 5) ruang lingkungan kosong; 6) taman; 7) tugu/monumen peringatan; 8) pasar; 9) taman bermain; 10) ruang terbuka komunitas; 11) pasar dalam ruangan; 12) daerah pelabuhan (wilayah kota yang berbatasan dengan air). Riset Ho & Tung Au mengkompilasikan berbagai studi internasional mengenai pengaruh adanya musik di ruang-ruang umum pada kota-kota lain di penjuru dunia (New York, Bath, Stockholm, Hong Kong, Santa Monica), pertunjukan musik membuat pengguna sarana-prasarana umum maupun pengunjung ruang publik membuat mereka merasa aman dan meningkatkan perasaan serta pandangan positif terhadap ruang umum tersebut. Hal ini hanya berlaku di kota-kota pada negara-negara yang melegalkan praktik mengamen (*busking*) di tempat umum, maka fungsi praktikal dari studi Ho & Tung Au adalah untuk menilai dampak pertunjukkan jalanan (pengamen) terhadap persepsi masyarakat mengenai ruang publik dengan menggunakan pendekatan eksperimental. Fungsi praktis dari studi mereka adalah sebagai masukan untuk pertimbangan kebijakan publik dan legalitas dari pertunjukan jalanan.

Jika pertunjukan jalanan dapat meningkatkan pengalaman positif masyarakat selama berada di ruang publik, maka sudah sebaiknya didukung melalui kebijakan publik dan peraturan yang membangun. Namun sebaliknya, jika pertunjukkan jalanan justru meninggalkan persepsi buruk masyarakat terhadap ruang publik tersebut, maka sudah sewajarnya mengambil langkah-langkah pencegahan.

3.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar manusia, kajian mengenai problematika ini sudah banyak sekali. Di Google Scholar sendiri (scholar.google.com), penelitian dengan kata 'kemiskinan' pada judulnya mencapai 378.000 dan penelitian yang dikeluarkan pada sepuluh tahun terakhir (2012-2022) sebanyak 983 menurut

Publish or Perish. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi problematika besar di Indonesia dan belum ada solusi yang benar-benar tepat dalam mengentaskan permasalahan ini jika sampai saat ini penelitian dan kajian mengenai kemiskinan masih terus membanjiri berbagai disiplin ilmu sosial. Kemiskinan bukanlah masalah baru di peradaban manusia, namun konsep dan pendekatan terhadap kemiskinan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Secara luas, kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan yang biasanya dibandingkan dengan standar kehidupan layak dalam satu masyarakat (kemiskinan relatif) ataupun dengan ukuran universal dari kebutuhan cukup (kemiskinan absolut) (Lemanski, 2016, hlm. 5). Kemiskinan sejatinya sangatlah lekat dengan ekonomi, ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok selalu dikaitkan dengan pemasukan finansial (ekonomi) seseorang. Akan tetapi, pada perkembangannya, kemiskinan semakin lama dipandang sebagai permasalahan multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial, kebudayaan, dan sebagainya.

Dalam Johan Arifin (2020), Suparlan (1984) mengartikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. Gunawan Sumodiningrat et al., (1999) menekankan beberapa aspek dalam munculnya kemiskinan, yaitu kemiskinan berarti: 1) masalah kerentanan, 2) akses untuk kesempatan kerja tertutup (lapangan kerja yang ada juga tidak memadai), 3) ketidakpercayaan dan sentimen buruk antara elit desa dengan para birokrat dalam menentukan keputusan tanpa memahami permasalahan ketidakberdayaan, 4) penghasilan masyarakat miskin dihabiskan untuk kebutuhan pangan yang terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas, 5) angka ketergantungan yang tinggi, 6) refleksi dari budaya kemiskinan multigenerasi. Menurut Mubyarto (1995), kemiskinan muncul karena rendahnya pendapatan masyarakat miskin sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan ketergantungan tinggi. BPS (2008) menetapkan standar kemiskinan di Indonesia berdasarkan perhitungan rupiah per kapita per bulan.

Sudah terlalu banyak program-program pembangunan yang mengedepankan kapitalis dan mengabaikan masyarakat, menjadikan manusia semata-mata sebagai objek dibandingkan sebagai subjek dari pembangunan. Johar Arifin (2020) merumuskan dengan tegas bahwa penting sekali bagi penyusun program-program pembangunan yang

khususnya pada penanggulangan kemiskinan untuk mengedepankan penghormatan dan pemenuhan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pandangan antropologi terhadap kemiskinan cukup berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan antropologi memandang kemiskinan secara kultural (kualitatif) dibandingkan secara material (kuantitatif), di mana penelitiannya menggunakan etnografi, analisis naratif, dan observasi partisipan untuk menemukan hubungan sosial kompleks antara manusia dalam suatu masyarakat. Antropologi menyumbangkan perspektif kritis dari budaya dan kebudayaan global untuk memperluas diskursus dari kemiskinan (Frerer & Vu, 2007). Salah satu teori terkemuka dicetuskan oleh Oscar Lewis (1959) mengenai *'the culture of poverty'* atau budaya kemiskinan.

Pada awal perkembangan dari studi mengenai kemiskinan dalam antropologi sekitar tahun 1960-an, antropolog berupaya mencoba pendekatan baru dengan memandang kemiskinan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari masyarakat (Frerer & Vu, 2007, hlm. 76). Dalam bukunya dengan judul *"Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty"*, Lewis memotret lima keluarga Meksiko dengan menggunakan etnografi di mana ia menyatakan bahwa perilaku dan kepercayaan diajarkan sedari masa kanak-kanak dan berperan penting dalam kelangsungan kemiskinan multigenerasi. Masyarakat yang terjebak dalam jeratan kebudayaan kemiskinan dapat pula merasa terpinggirkan oleh penyediaan pelayanan yang mereka anggap tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan. Meski penelitian Lewis hanya fokus kepada (lima) keluarga di Meksiko saja, akan tetapi ia berargumen bahwa kebudayaan kemiskinan ini tidak dapat dikekang oleh kelompok etnis semata maupun batas geografis. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dan kepercayaan yang mendasari kebudayaan kemiskinan ini dapat ditemukan di mana saja. Pemikiran ini mengaitkan kepribadian individu dengan penyebab kemiskinan, orang-orang miskin memiliki seperangkat perilaku yang menyimpang dari norma sosial di mana perilaku tersebut hanya dapat ditemukan di masyarakat miskin atau dalam kata lain, unik di kelas bawah. Seperangkat perilaku tersebut diturunkan dari generasi ke generasi, mengabadikan kebudayaan tersebut di kalangan mereka (Frerer & Vu, 2007, hlm. 76).

Sebenarnya ada dua aliran pemikiran dalam kerangka teori kebudayaan kemiskinan, yaitu secara kultural dan secara kelas sosial. Secara kultural telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Pemikiran kebudayaan kemiskinan kelas mengemukakan bahwa perilaku masyarakat golongan miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh kebudayaan kemiskinan secara kultural, merupakan hasil adaptasi dari lingkungan sosial mereka. Pada hakikatnya, jika semata-mata memandang kemiskinan secara kultural dari masyarakat miskin itu sendiri, peneliti seakan-akan memvonis golongan miskin akan kemiskinan mereka karena pilihan, sikap, serta cara hidup mereka dan mengabaikan aspek sosial dari lingkungan tempat tinggal mereka (misalnya, hubungan sosial dengan kelas menengah ke atas). Pandangan teoritis yang bermula dari gagasan Lewis dari hasil penelitian etnografinya tentu harus dikembangkan dan dikomparasikan dengan kelompok masyarakat di negara-negara lain karena tidak bisa digeneralisir kepada seluruh masyarakat manusia.

Selanjutnya, Frerer & Vu memaparkan mengenai beberapa pendekatan kontemporer di antropologi dalam mengkaji kemiskinan yang merupakan penggabungan dari teori-teori kritis —seperti globalisasi dan materialisme— dan kebudayaan pada perspektif global. Dalam globalisasi, para antropolog berupaya untuk mengidentifikasi dampak dan pengaruh dari ekonomi global terhadap golongan miskin urban. Sedangkan materialisme berupaya untuk menjelaskan segala sesuatu, dalam konteks ini kemiskinan, dari faktor fisik (material) semata seperti lingkungan, teknologi, dan ekonomi dibandingkan dari faktor non-fisik (non-material) seperti kepercayaan dan adat. Materialisme kebudayaan merupakan pendekatan teoritis yang membahas mengenai dampak kondisi material pada dimensi non-material dalam ideologi kebudayaan.

3.3 Indikator daerah SDGs Tujuan ke-1 & Tujuan ke-8

Mengutip dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020 (Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, 2020), tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta per September 2020 sedikit memburuk dibandingkan tahun lalu, yaitu senilai 4,69%. Padahal pada bulan yang sama di tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 3,42%

(indikator 1.2.1). Persentase PMKS yang terpenuhi hak dasarnya mencapai angka 92,24% dari target yang hanya (64,50%) di tahun 2020, menunjukkan peningkatan yang baik pada indikator 1.3.1 (c) (Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, 2020, hlm. 7–8).

Selanjutnya pada Tujuan 8, indikator 8.5.2 mengalami kenaikan pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakin sebesar 10,95% per Agustus 2020 di mana target pada RAD (Recana Aksi Daerah) Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,00% di tahun 2020 sehingga membuat indikator ini menjadi salah satu indikator yang cukup genting penyelesaiannya. Pada indikator 8.5.2 (a), persentase setengah pengangguran mengalami kenaikan cukup drastis yang mencapai angka 21,82% per Agustus 2020, padahal target pada RAD dicantumkan sebesar 16,77% (Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, 2020, hlm. 13–14).

Penulis hanya mencantumkan sebagian dari indikator-indikator keberhasilan pada kedua Tujuan yang diangkat dalam artikel ini karena penulis merasa bahwa yang dapat dikaitkan dengan permasalahan pengamen adalah terkait penyelesaian kemiskinan dan pengangguran.

4. Simpulan

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, pengamen masih menjadi permasalahan serius di Provinsi DKI Jakarta. Dewasa ini, pengamen tidak lagi hanya para musisi jalanan yang menghibur para pengendara di kala lampu lintas sedang menyala merah atau di antara para pengunjung rumah makan di pinggir jalan. Namun, kini muncul pengamen jenis baru seperti badut jalanan (badut Mampang) dan manusia silver yang telah banyak menyita perhatian berbagai pihak di masyarakat sehingga penulis merasa bahwa konsep dari ‘mengamen’ sudah sangat berubah. Perkembangan dari wujud baru ‘mengemis’ ini sayangnya tidak diimbangi dengan penanggulangan tepat dari pemerintah karena masih belum terlihat adanya tanda-tanda telah dientaskan. Penulis berpendapat bahwa permasalahan dari pengamen harus diselesaikan dari akarnya, yaitu kemiskinan.

Apabila dikaji secara teoritis dari teori budaya kemiskinan (*culture of poverty*) oleh Oscar Lewis, maka permasalahan mengenai pengamen sebenarnya cukup kritis. Teori tersebut menyatakan bahwa sikap, perilaku, kepercayaan, bahkan nilai dari

masyarakat miskin sejatinya mengabadikan lingkaran setan kemiskinan karena menurunkannya pada generasi selanjutnya. Dalam kasus ini, terlihat dari eksploitasi anak oleh keluarga yang terjadi untuk mencari sesuap nasi dari belas kasihan masyarakat umum. Eksploitasi ini berpotensi untuk mengajarkan kepada anak bahwa hanya inilah sumber pendapatan yang ‘layak’ dikerjakan oleh mereka.

Berangkat dari hal ini, pemerintah sebenarnya dapat menginkorporasikan solusi pengentasan kemiskinan dan penyediaan pekerjaan yang layak serta pembangunan ekonomi yang sehat dengan pembangunan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa menyandingkan pengamen Indonesia dengan pengamen di berbagai negara maju rasanya jauh sekali. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan ditambah dengan sikap positif masyarakat di sana terhadap pengamen (*street buskers*) dapat menambah nilai kultural para pengamen internasional, apalagi mereka adalah wajah dari kebudayaan urban yang telah terpatri pada dunia global dewasa ini.

Sayangnya, tanpa adanya dukungan konkret dari data primer dan hanya bisa menggantungkan penulisan artikel ini dari data sekunder berupa Laporan Pencapaian TPB DKI Jakarta, penulis berani menyatakan pendapat bahwa pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum mencapai tingkat keberhasilan memuaskan terhadap kedua permasalahan ini. Dari hasil observasi penulis sebagai penduduk DKI Jakarta (Jakarta Selatan), belum ada upaya nyata untuk memberdayakan masyarakat yang sebenarnya tergolong rentan ini. Pengamen, dalam berbagai wujud, masih menjamur di Ibu Kota dan umur sebagian besar pengamen tersebut semakin lama semakin mengkhawatirkan. Maka, penulis juga masih mempertahankan argumen penulis bahwa harus ada suatu perubahan persepsi mengenai mereka agar lebih mudah diberdayakan. Jika pemerintah masih memperlakukan mereka layaknya kriminal dengan menggunakan kekerasan ketika ‘menertibkan’ mereka, maka selama itu pula masyarakat akan memandang pengamen sebagai pengganggu jalanan dan pandangan ini akan mendarah daging pada generasi-generasi pengamen cilik yang sebenarnya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam praktiknya, pemerintah masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang memuaskan dalam Tujuan 1 dan Tujuan 8 di SDGs karena belum berhasil menyelesaikan

problematikan kemiskinan dan pengamen yang telah lama menjamur di negeri ini. Dari berbagai kajian literatur yang telah dibahas, maka dibutuhkan pendekatan baru dalam memandang permasalahan ini. SDGs sebagai program global dalam membangun ekonomi, sosial, manusia, dan lingkungan secara berkelanjutan dapat menjadi patokan dalam menyusun strategi-strategi pengentasan kemiskinan dan penyediaan pekerjaan yang layak bagi pengamen dengan tetap memanusiakan mereka. Adapun saran bagi penelitian mendatang yang akan mengangkat topik ini adalah dengan menggunakan metode penelitian etnografis untuk mendapatkan data primer dari kondisi riil masyarakat pengamen serta memperluas cakupan penelitian, tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta. Topik kajian ini memiliki berbagai potensi untuk dikaji dari berbagai sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial DKI Jakarta. (2021). *Dinsos DKI Jangkau 5.513 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Selama Tahun 2021*. <https://dinsos.jakarta.go.id/berita/post/dinsos-dki-jangkau-5513-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-selama-tahun-2021>
- Doumpa, V., & Broad, N. (2014). BUSKERS AS AN INGREDIENT OF SUCCESSFUL URBAN PLACES. *Future of Places*.
- Frerer, K., & Vu, C. M. (2007). An Anthropological View of Poverty. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 16(1–2), 73–86. https://doi.org/10.1300/J137v16n01_06
- Hilmi, J. (2015). *FENOMENA KEBERADAAN PENGAMEN ANAK DI LINGKUNGAN WISATA; STUDI KASUS PENGAMEN ANAK DI LINGKUNGAN WISATA KOTA TUA JAKARTA* [Undergraduate thesis]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ho, R., & Au, W. T. (2021). Effect of Street Performance (Busking) on the Environmental Perception of Public Space. *Frontiers in Psychology*, 12, 647863. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.647863>
- Lemanski, C. (2016). Poverty: Multiple perspectives and strategies. *Geography*, 101(1), 4–10. <https://doi.org/10.1080/00167487.2016.12093977>
- Mielke, L. (2010). Rogue Performances: Staging the Underclasses in Early American Theatre Culture. By Peter P. Reed. *Theatre Journal*, 62(4).
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PREMANISME OLEH PENGAMEN DI SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG*. 6.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, & Arifin, J. (2020). BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>

- Stähler, S., & Mierisch, K. K. (2022). The street music business: Consumer responses to buskers performing on the street and on online video platforms. *Marketing Letters*, 33(2), 325–350. <https://doi.org/10.1007/s11002-021-09566-8>
- Suharyanto, A. (2021). Punk: Pengamen Jalanan dan Sebuah Subkultur Dari Kehidupan Urban di Kota Medan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 7(1), 98. <https://doi.org/10.24114/antro.v7i1.24738>
- Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020* (Laporan Pencapaian; RSA Replay, hlm. 117). Sekretariat TPB/SDGs. <https://sdgs.jakarta.go.id/uploads/document/laporan-pencapaian-tpbsdgs-provinsi-dki-jakarta-tahun-2020.pdf>
- Yuniarti, N. (2013). EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN DAN PENGEMIS DI TERMINAL TIDAR OLEH KELUARGA. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>